



RILIS
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI III DPR RI
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023–2024
KE PROVINSI SUMATERA SELATAN (PALEMBANG)
31 OKTOBER – 2 NOVEMBER 2024

Komisi III DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025 ke Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 31 Oktober – 2 November 2024. Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dipimpin oleh Dr. Habiburokhman, S.H., M.H., Ketua Komisi III DPR RI, dan diikuti oleh beberapa Anggota Komisi III DPR RI dari berbagai Fraksi.

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Komisi III DPR RI terhadap Mitra Kerja Komisi III DPR RI yang berada di Provinsi Sumatera Selatan atas penegakan hukum pada sektor Kamtibmas dan sektor pengelolaan Sumber Daya Alam. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik ini, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI melaksanakan rapat dengan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Irjen. Pol. Andi Rian R. Djajadi, S.I.K., M.H., dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Dr. Yulianto, S.H., M.H.

Dalam rapat tersebut, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI telah menerima penjelasan secara langsung dari Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan terkait penanganan perkara sumber daya alam, seperti pertambangan, kehutanan, lingkungan, *illegal things (illegal drilling, illegal mining, dan illegal refinery)*, dan perkara yang menarik perhatian masyarakat, serta kondisi harkamtibmas di Provinsi Sumatera Selatan. Atas penjelasan tersebut, Komisi III DPR RI menyampaikan pendalaman-pendalaman di antaranya, mengapresiasi kinerja Polda dan Kejati Sumatera Selatan beserta jajaran dalam pengungkapan kasus, termasuk kasus-kasus besar di Provinsi Sumatera Selatan. Komisi III DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik ini mendesak Polda dan Kejati Sumatera Selatan agar menindak tegas praktik pertambangan ilegal, dengan pelaku perusahaan-perusahaan besar, yang merugikan negara dan masyarakat sekitar lokasi pertambangan. Selain itu, Komisi III DPR RI mengharapkan agar Polda dan Kejati Sumatera Selatan beserta jajaran menerapkan pendekatan *Restorative Justice (RJ)* dalam penyelesaian kasus yang tidak material secara hukum dan kasus yang melibatkan masyarakat kecil, serta selalu mengutamakan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, 2 November 2024

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan